

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan kajian dan analisis terkait pra penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan mengaplikasikan aturan ke beberapa contoh kasus penempatan, memang benar bahwa aturan mengenai pra penempatan masih harus ditingkatkan terutama dalam hal memberikan kepastian hukum sebagai jaminan untuk CPMI. Pengaturan yang telah ada sebetulnya telah mencegah dari berbagai risiko yang akan timbul. Akan tetapi meskipun Indonesia memiliki tahapan proses registrasi yang panjang, cukup rumit, dan memakan waktu yang cukup lama, masih belum cukup menjamin perlindungan CPMI. Dengan pergantian perizinan operasional P3MI membuat perlindungan CPMI dan PMI semakin lemah, tidak adanya aturan yang spesifik mengenai pendirian P3MI dan terkait pembiayaan yang relatif tinggi dan menyebabkan kerugian bagi CPMI. Argumen tersebut diperkuat dengan mempelajari kasus-kasus yang pernah terjadi dimasa lampau, di mana CPMI tidak mendapatkan perlindungan untuk pada masa pra penempatan. Untuk mengoptimalkan pengaturan baru mengenai perizinan berusaha, penulis melihat dari pengaturan hukum Ukraina yang mirip seperti peraturan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah Indonesia seharusnya melihat dan belajar dari Hukum Ukraina terkait pengadaan perizinan khusus bagi badan usaha yang melakukan penempatan pekerja migran.

Selain itu, penulis juga mempelajari pengaturan dari negara penerima dan negara pengirim, perlu diketahui bahwa terdapat kondisi-kondisi tertentu seharusnya dipertimbangkan untuk pengiriman *Seasonal Worker*. Kondisi pekerjaan *Seasonal Work* di Uni Eropa diatur dalam *Directive* yang mengatur mengenai standar khusus dalam merekrut pekerja *Seasonal Work*. Hal tersebut membuat Indonesia harus mempelajari untuk menemukan persyaratan dan ketentuan yang pas, sehingga perlindungan bagi PMI akan tetap terjamin.

Directive EU merupakan standar peraturan yang menarik untuk dilakukan pengkajian terhadap penempatan *Seasonal Work*. Pembagian peran antara pemberi kerja dan negara penempatan akan berpengaruh terhadap siapa yang akan memberikan perlindungan terhadap pekerja migran yang bekerja. Poin penting lainnya adalah sebagai standar untuk negara tujuan penempatan dalam memberikan perlindungan untuk calon pekerja, sehingga Pemerintah Indonesia dapat melihat dan mempelajari bagaimana untuk memberikan pekerjaan yang ideal dengan kondisi pekerjaan yang sangat rentan. Sebagai penutup, penulis ingin merekomendasikan pengaturan ulang dan rekomendasi proses dan persyaratan mengenai pra penempatan pekerja migran Indonesia guna untuk meningkatkan kepastian dan keadilan hukum, serta meningkatkan peran pemerintah dan lembaga yang berwenang.

5.2 Saran

Sebagaimana dengan apa yang telah diuraikan, pemerintah memiliki peran yang penting untuk mendukung perbaikan atas pengaturan pra penempatan PMI. Penempatan PMI tidak akan terlepas dari pihak-pihak yang saling terikat, sehingga seluruh pihak dalam hal ini memiliki bagiannya tersendiri untuk menanggung masalah-masalah yang terjadi akibat dari proses pra penempatan yang tidak memadai. Dengan demikian, terdapat beberapa saran penulis dari penelitian ini, yaitu:

1. Saran Bagi Pemerintah
 - a. Pemerintah perlu melakukan pengkajian ulang pengaturan terkait pra penempatan untuk meningkatkan kepastian jaminan bagi CPMI. Pengaturan yang ada telah dirancang sedemikian rupa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan meskipun Pemerintah Indonesia telah melakukan pencegahan dalam proses ini.
 - b. Pemerintah perlu menguatkan pengaturan mengenai perizinan khusus untuk perusahaan yang beroperasi dalam bidang penempatan pekerja migran.
 - c. Pemerintah perlu melakukan kajian mengenai kondisi *Seasonal Work* di negara-negara tertentu. Dengan begitu, pemerintah akan

mengetahui langkah yang tepat untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap *Seasonal Worker*, mengingat di Eropa sudah ada yang mengkaji bahwa *Seasonal Worker* adalah pekerjaan yang rentan terhadap eksloitasi.

- d. Pemerintah perlu meningkatkan perjanjian internasional untuk menguatkan perlindungan PMI di negara tujuan penempatan. Dengan adanya perjanjian internasional dengan negara tertentu, tentunya akan membantu untuk menciptakan lingkungan yang aman serta perlindungan yang terjamin untuk PMI.
2. Saran Bagi P3MI
- a. P3MI perlu untuk meningkatkan kesadaran terhadap CPMI yang diberangkatkan, dengan mempertimbangkan jaminan serta keputusan yang *win-win solution* agar menguntungkan P3MI dan PMI. Kesadaran ini perlu ditingkatkan guna untuk mencegah P3MI yang bertindak sewenang-wenang, hanya memikirkan keuntungan dibandingan peningkatan perlindungan terhadap CPMI.
 - b. P3MI perlu mengkaji ulang mengenai konsep pekerjaan *seasonal*, sehingga dapat mengetahui apa saja persyaratan yang dibutuhkan, guna untuk meningkatkan perlindungan PMI.
 - c. P3MI diwajibkan untuk melakukan riset terhadap kondisi kerja di negara penempatan, aturan yang berlaku, dan persyaratan masuk ke negara penempatan. Meskipun pada saat melakukan kerjasama dengan mitra asing, informasi tentang hal tersebut akan disampaikan, namun ada baiknya untuk melakukan riset secara mandiri sebagai pengetahuan tambahan. Dengan begitu, P3MI dapat membuat kantuan sendiri supaya meningkatkan perlindungan terhadap PMI.

Daftar Pustaka

Buku

- Harahap, D. A. M. (2020). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Literasi Nusantara.
- International Labour Organization. (2006). *Hak-hak pekerja migran: buku pedoman untuk serikat pekerja Indonesia*. Organisasi Perburuhan Internasional. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/-asia/-/-ro-bangkok/-/-ilo-jakarta/documents/publication/wcms_117195.pdf
- Kansil, C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka
- Manullang, S. H. (1988). *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. PT Rineka Cipta.
- Marzuki, M. P. (2005) *Penelitian Hukum*. PT Kencana
- McKinney, C., Coe, S., & Stewart, I. (2023). *Seasonal Worker visas and UK Agriculture*. House of Commons Library Parliament UK.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.

Jurnal

- Basofi, M. B., & Fatmawati, I. (2023, Juni 1). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Ciptakerja*. Jurnal Profesional.
- Chattier, P. (2019). *Beyond development impact: gender and care in the Pacific Seasonal Worker Programme*. Gender & Development (Routledge) Journal, Vol 27 (Issue 1).
- Puspitasari, D., & Nuraini, S. (2022, Oktober 25). *Strategi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengurangi Angka Pengangguran Di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmu Pemerintahan,
- Shofarudin, H., & Indradi, A. (2020). *Pelaksanaan Sosialisasi Taruna Politeknik Imigrasi Bersama Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pati Dalam Rangka Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural*. Journal Poltekim,
- Sucipto, T. H., Pasaribu, A., & Soetijono, I. K. (2023). *Perlindungan Hukum Perjanjian Penempatan Antara Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI (Studi Kasus di PT.*

Pamor Sapta Dharma dan PT. Panca Ashma Tunggal). Jurnal Untag Banyuwangi

Vicol, D.O. and Savistki, A. (2022) *Seasonal work after the war in Ukraine. An analysis of Home Office entry clearance data for Q1 2021 – Q1 2022, and what it means for the fight against labour exploitation.*

Laporan Terpublikasi

Kementerian Luar Negeri. (2022). *Laporan Kementerian Luar Negeri Tahun 2022.*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Peraturan BP2MI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Penandatanganan dan Verifikasi Perjanjian Kerja

Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia

Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Kepada Pemberi Kerja Berbadan Hukum di Kerajaan Inggris untuk Jabatan *Agricultural Seasonal Worker*

Directive 2014/36/EU of The European Parliament and of the Council on the conditions of entry and stay of third-country nationals for the purpose of employment as seasonal workers. (Translated to Indonesian)

Gangmasters (Licensing) Act. 2004

Seasonal Worker Scheme UK.

Undang-Undang Negara Ukraina tentang Perusahaan di Ukraina Tahun 1991

Undang-Undang Ukraina tentang Migrasi Tenaga Kerja Eksternal (VVR), 2015, No. 49-50

Keputusan Kabinet Menteri Ukraina tanggal 27 Oktober 2023 No. 1118 tentang Beberapa Permasalahan dalam Menjalankan Kegiatan Usaha di Bidang Mediasi dalam Pekerjaan di Luar Negeri

Peraturan Kementerian Tenaga kerja dan Kebijakan Sosial Ukraina Nomor 155/534 tanggal 19 Desember 2001 tentang Persetujuan Persyaratan Lisensi Proses Ekonomi dalam Kegiatan Mediasi dalam Pekerjaan untuk Bekerja di Luar Negeri

Sumber Internet

Ali, A. (2022). *How Much Does It Cost a UK Company to Sponsor a Work Visa?* Diakses pada tanggal 20 Mei, 2024 dari <https://immigrationlawyers-london.com/blog/how-much-does-it-cost-a-uk-company-to-sponsor-a-work-visa.php>

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (n.d.). *Skema Penempatan.* Diakses pada 3 April, 2024, dari <https://sumbar.bp2mi.go.id/sibalun/skemapenempatan#:~:text=Skema%20G%20to%20G%20adalah,dengan%20Pemerintah%20Negara%20tujuan%20penempatan>

BBC News Indonesia. (2022, September 22). *Pekerja migran Indonesia di Inggris: 'Pemetik buah tercepat ketiga', pendapatan sangat besar, tapi 'biaya ke agen begitu tinggi'.* BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c723le5qlgqo>

BBC News Indonesia. (2023, February 15). *Ratusan WNI kabur di Inggris, lebih dari 1.200 pekerja asal Indonesia terancam batal merantau.* BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-64483109>

Eurofound. (2021, December 1). *Seasonal Worker.* Diakses pada 28 September, 2023, dari <https://www.eurofound.europa.eu/en/european-industrial-relations-dictionary/seasonal-worker>

European Commission. (n.d.) *Seasonal Workers Directive.* Diakses pada 15 Mei, 2024 dari <https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/legal-migration-and-integration/work/seasonal-workers-directive>

Gangmasters and Labour Abuse Authority. (n.d.). *The Nature and Scale of Labour Exploitation across all Sectors within the United Kingdom.* Diakses pada 10 Oktober, 2023, dari <https://www.gla.gov.uk/media/3537/external-nature-and-scale-of-labour-exploitation-report-final-version-may-2018.pdf>

Gangmasters and Labour Abuse Authority. (n.d.). *Your rights - Seasonal workers scheme.* Diakses pada 28 Oktober, 2023, dari <https://www.gla.gov.uk/publications/resources/seasonal-workers-scheme/>

- Gangmasters and Labour Abuse Authority. (n.d.). *Your rights- Seasonal workers scheme.* Diakses pada 10 Oktober, 2023, dari <https://www.gla.gov.uk/publications/resources/seasonal-workers-scheme/>
- Government UK. (2023, March 16). *Sponsor a Seasonal Worker.* Diakses pada 12 Oktober, 2023, dari https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1149235/Sponsor-a-Seasonal-Worker-04-23_1.0.pdf
- Hall, A. (2023, February 16). *Working in the UK: Hundreds of Indonesian Citizens Escape, More Than 1,200 Workers Threatened to Cancel.* <https://andyjhall.org/2023/02/16/http-andyjhall-org-2023-02-16-bbc-news-16th-feb-2023-working-in-the-uk-hundreds-of-indonesian-citizens-escape-more-than-1200-workers-dari-indonesia-threatened-to-cancel/>
- Harrison, D. (n.d.). *Seasonal Worker definition and meaning / Collins English Dictionary.* Collins Dictionary. Diakses pada 2 Oktober, 2023, dari <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/seasonal-worker>
- Hukumonline. (n.d.). *Ketentuan Mengenai Pekerjaan Musiman.* Hukumonline. Diakses pada January 2, 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-mengenai-pekerjaan-musiman-lt5466a18391e71>
- Hukumonline. (2023, September 30). *Teori-teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.* Diakses pada 1 Februari, 2024, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>
- International Labour Organization. (n.d.). *Convention C143 - Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143).* Diakses pada 20 September, 2023, dari https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312288
- International Labour Organization (n.d.). *International Labour Standards on Migrant workers.* ILO. Diakses pada 1 Agustus, 2023, dari <https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/migrant-workers/lang--en/index.htm>
- Jangkar Global Groups (2023, Agustus 8). *Cara Apply Visa RSE New Zealand.* Di akses pada 31 Maret, 2024, dari <https://jangkargroups.co.id/cara-apply-visa-rse-new-zealand/>
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (n.d.). *Panduan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.* Diakses pada 29 Maret, 2024, dari <https://panduan.kemnaker.go.id/uploads/1678271857-Panduan-P3MI-1.0.0.pdf>

Kiptanui, L. (2023, Juli 22). *Seasonal Work: Benefits, Types and Steps for Getting a Job*. Diakses pada 10 Oktober, 2023, dari <https://www.indeed.com/career-advice/finding-a-job/seasonal-work>

Rights Lab University of Nottingham. (4 October 2019). *Modern Slavery Act Reporting in the Agricultural Sector*. Diakses pada 23 Mei, 2024 dari <https://www.nottingham.ac.uk/research/beacons-of-excellence/rights-lab/resources/reports-and-briefings/2019/march/briefing-agriculture-and-modern-slavery-act-reporting-for-government.pdf>

UK Government. (n.d.) *Workers and Temporary Workers: guidance for sponsor part 2: sponsor a worker (accessible)*. Diakses pada tanggal 28 April, 2024, dari <https://www.gov.uk/government/publications/workers-and-temporary-workers-guidance-for-sponsors-part-2-sponsor-a-worker>

UK Government. *Seasonal Worker Visa*. Diakses pada tanggal 20 Mei, 2024 dari <https://www.gov.uk/seasonal-worker-visa>